

# Komitmen Pakta Integritas

## Molor Buat SPJ, Walikota Ganti Kepala SKPD

**PONTIANAK.** Peringatan pada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang terbiasa bersantaisantai menyampaikan laporan keuangan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sebab Walikota Pontianak, H Sutarmidji, SH, MHum, akan mengganti alias mencopot setiap Pimpinan SKPD yang dinilai lambat menyerahkan SPJ.

"Siapa yang tidak disiplin, dan tertib akan kita berikan

surat peringatan hingga peringatan ketiga. Kalau sampai peringatan ketiga masih juga terlambat dalam pelaporan SPJ, kepala SKPD bersangkutan langsung kita ganti," tegas Sutarmidji, dalam sambutannya saat serah terima hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se Kalimantan Barat (Kalbar), di Aula Kantor Perwakilan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalbar.

Kota Pontianak menduduki peringkat kedua se-Kalbar, terkait penyelesaian tindak lanjut temuan dari hasil audit BPK terdahulu. Sutarmidji menyebutkan, capaian ini menunjukkan, bukti keseriusan Pemkot dalam menindaklanjuti beberapa temuan hasil audit BPK. Hasil temuan mulai dari tahun 2000 hingga 2005 sudah banyak yang ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemkot.

"Kita berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti lagi temuan-temuan itu, ke depannya kita berharap tahun depan temuan-temuan itu semakin berkurang dan berkurang hingga selesai semuanya," katanya.

Upaya Pemkot dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit BPK, merupakan komitmen dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disandang Pemkot tahun ini. Apalagi, Kota Pontianak adalah satu-satunya daerah se-Kalimantan yang meraih predikat tertinggi itu dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

"Kita patut berbangga, karena Kota Pontianak satu-satunya di Kalimantan yang meraih WTP. Saya yakin, kedepan daerah-daerah lainnya di Kalbar juga akan menyusul dalam perolehan predikat WTP," tutur Sutarmidji.

Selain itu, Pemkot Pontianak bersama Pemprov Kalbar dan Kabupaten Sekadau, menan-



Walikota Pontianak, Sutarmidji menerima hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI. Dina

datangani keputusan bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data. Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo mengatakan, tahun 2012 telah

memberikan sebanyak 2.801 temuan, dengan 5.909 rekomendasi. "Sebanyak 3.694 rekomendasi atau 62,51 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kemudian 1.716 rekomendasi atau 29 persen masih dalam proses dan masih belum sesuai dengan tindak lanjut," papar Adi.

Sisanya sebanyak 496 rekomendasi yang dikeluarkan BPK

atau 8 persen belum ditindaklanjuti. Dia menilai, pemerintah daerah di wilayah Kalbar telah menunjukkan usaha untuk memperbaiki temuan-temuan hasil audit BPK dengan capaian-capaian yang signifikan.

"Kami harap ke depan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan persentase dari tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK," pungkasnya. (dna)